

**IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN PARIWISATA BAHARI  
DI PROPINSI SUMATERA BARAT DALAM RANGKA  
PERJANJIAN KERJASAMA IMT-GT  
(INDONESIA, MALAYSIA, THAILAND-GROWTH TRIANGLE)  
ERA OTONOMI DAERAH  
Studi Kasus Kepulauan Mentawai**

**SKRIPSI**

**Diajukan guna memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**SRI AFRIANIS**

**99 140 165**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2004**

**IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN PARIWISATA BAHARI DI  
PROPINSI SUMATERA BARAT DALAM RANGKA KERJASAMA  
IMT-GT DI ERA OTONOMI DAERAH  
Studi Kasus Kepulauan Mentawai**

( Sri Afrianis, 99 140 165, Fakultas Hukum Unand, 85 halaman, 2004)

**ABSTRAK**

Kerjasama IMT-GT adalah suatu kerjasama ekonomi sub-regional yang meliputi tiga negara yakni Indonesia, Malaysia, Thailand yang bersifat komplementer atas dasar nota kesepakatan (*Memorandum of Understanding*) dari ketiga negara. Bentuk kerjasama IMT-GT di bahas dalam pertemuan-pertemuan yang terdiri dari beberapa tahap, yakni : *Task Force*, *Implementing Technical Group* (ITG), *Business Council Meeting* (BCM), *Senior Official Meeting* (SOM), dan *Ministrial Meeting* (MM). Salah satu objek wisata yang diusulkan oleh Propinsi Sumatera Barat adalah Kepulauan Mentawai. Kepulauan Mentawai memiliki potensi wisata bahari yang sangat besar untuk berperan aktif dalam kerjasama IMT-GT. Potensi tersebut diantaranya adalah gelombang laut yang mencapai ketinggian lebih dari 5 meter, potensi bawah laut dengan anekaragaman hayati yang terdapat didalamnya, pantai-pantai yang berpasir putih, dan juga atraksi suku pedalaman.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memakai pendekatan secara yuridis empiris dengan melihat hukum dalam pelaksanaannya. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa belum ada implementasi dari kerjasama IMT-GT di Kepulauan Mentawai. Hal itu disebabkan adanya kendala-kendala baik ditingkat propinsi maupun Kabupaten Mentawai sendiri sebagai kabupaten baru. Diantaranya, koordinasi antar daerah setelah berlakunya Otonomi Daerah belum ditata secara baik sehingga sosialisasi kerjasama belum maksimal serta proses pembangunan Mentawai masih dalam tahap pembenahan infrastrukturnya.

Peluang yang ada dalam kerjasama IMT-GT bagi Sumatera Barat, khususnya Kepulauan Mentawai belum dimanfaatkan secara efektif. Karena keterbatasan yang ada dalam hal aturan hukum, minimnya dana serta posisi *hinterland* sehingga hasil diharapkan belum dapat dicapai. Kerjasama IMT-GT masih belum dirasakan manfaatnya oleh Kepulauan Mentawai. Namun, dengan potensi yang ada serta kesungguhan pemerintah nantinya kerjasama IMT-GT diharapkan akan memberikan hasil yang maksimal.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Aspek wisata Indonesia pada dasarnya memiliki potensi yang cukup besar dan memiliki daya saing di dunia internasional. Dua pertiga wilayah nusantara terdiri dari perairan serta memiliki kurang lebih 17,508 pulau dan berjuta hektar taman laut yang keindahannya diakui oleh sejumlah pecinta wisata bahari internasional. Hal ini dibuktikan dari sebuah ekspedisi laut selama dua bulan lebih (Januari-Maret 2000) oleh tim ekspedisi "*The Marine Parks Of Indonesia*" yang dipimpin oleh President of Raffles Marine Ltd, Singapore, Francis Lee bersama TNI AL<sup>1</sup>. Daya tarik yang paling penting dalam wisata bahari didasarkan pada daya tarik sumber daya alam kelautan (*marine attractions*), adat istiadat dan budaya masyarakat pesisir.

Namun, Indonesia tidak dapat memanfaatkan dan tidak menjadikannya sebagai andalan utama wisata. Padahal, pertumbuhan wisata bahari rata-rata di dunia mencapai sekitar 30 persen per tahun. Menurut Sarwono Kusumaatmadja, prospek wisata alam dan wisata bahari masih cerah, yang diindikasikan dengan adanya semboyan *back to nature* yang dianut bangsa-bangsa maju di dunia saat ini<sup>2</sup>. Wisata bahari adalah jenis wisata minat khusus yang memiliki aktivitas yang berkaitan dengan kelautan, baik di atas permukaan laut (*marine*) maupun kegiatan yang dilakukan di bawah permukaan laut (*sub marine*).

<sup>1</sup> G. Bengen, Senior Program Advisor Proyek Pesisir dan Kepala Divisi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan-PKSPL-IPB dan Achmad Rizal Staf Research Associate PKSPL-IPB

<sup>2</sup> [www.pesisir.or.id/warta/030301\\_01.html](http://www.pesisir.or.id/warta/030301_01.html). Selasa, 11 September 2001



Peningkatan wisata bahari akan menjadi fokus utama untuk meningkatkan jumlah wisatawan ke Indonesia tahun 2003 ini, karena tahun 2003 dicanangkan sebagai Tahun Wisata Bahari yang meneruskan Tahun Ekowisata dan Pegunungan Nasional 2002. Mengenai objek-objek wisata bahari baru yang akan dikembangkan, Kepala Subdit Pengembangan Wisata Direktorat Diversifikasi Produk Wisata Bahari Achyaruddin mengatakan, pihaknya tengah mengembangkan wisata dengan ketertarikan khusus seperti menyelam, *snorkelling*, dan *surfing*. Ia mengakui, selama ini wisatawan hanya berfikir tentang Bali, Bunaken, dan Lombok. Padahal, hampir seluruh pantai di Indonesia memiliki potensi wisata. "Apalagi, pulau kita itu kan ada 17.508 pulau,"katanya<sup>3</sup>.

Salah satu tempat yang dimaksud oleh Achyaruddin adalah Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Kepulauan Mentawai terdiri dari Pulau Siberut, Sipora, Pagai Utara dan Pagai Selatan, dengan luas 601.135 ha atau 14,23 persen dari luas dari Sumatera Barat. Pada tanggal 8 maret 2001 Bupati Mentawai mengadakan pertemuan dengan pengusaha-pengusaha di bidang Pariwisata di Kep.Mentawai. Yang mana pertemuan tersebut diadakan di Kantor sementara Bupati(Di Padang).Di sana juga hadir Rick Cameron dan Bangun (MWB)dan Pak Asri (Vaninda &STC). Subjek dalam pertemuan tersebut adalah dalam rangka persiapan Surf visitor 2001 di Mentawai

Pengembangan setiap objek pariwisata membutuhkan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Termasuk pengembangan pariwisata bahari ini. Untuk itu investasi dari negara lain merupakan salah satu bentuk usaha mendapatkan dana segar dalam mengelola sumber daya yang ada. Masuknya investasi ke suatu

---

<sup>3</sup> "Pengembangan Wisata Bahari Salah Konsep", Kompas, 28 September 2002.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kerjasama IMT-GT merupakan bentuk kerjasama keterkaitan (linkage) ekonomi antar daerah dari tiga negara, Indonesia, Malaysia dan Thailand. Salah satu model kerjasama IMT-GT adalah di bidang pariwisata yang mekanismenya terdiri dari pertemuan-pertemuan rutin yang diadakan setiap tahunnya.
2. Potensi pariwisata di Kepulauan Mentawai merupakan salah satu produk unggulan dari Propinsi Sumatera Barat sebagai objek dalam kerjasama IMT-GT yang sampai saat ini masih belum dapat diimplementasikan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi dalam merealisasikan kerjasama tersebut.
3. Kendala-kendala yang ada antara lain :
  1. Kondisi geografis

Propinsi Sumatera Barat berada pada posisi *hinterland* dalam kerjasama IMT-GT. Hal tersebut merupakan salah satu faktor penghambat dalam memaksimalkan pelaksanaan kerjasama. disamping itu, jarak antara Kepulauan Mentawai dengan Propinsi yang cukup jauh dan melintasi wilayah laut yang dalam menyulitkan masing-masing pihak untuk mengadakan kontak satu sama lain serta masih minimnya sarana

## DAFTAR PUSTAKA

- A.K.,Syahmin, 1992, *Hukum Internasional Publik Dalam Kerangka Analitis*, Jilid I, Bina Cipta, Bandung;
- Admawiria, Sam Suhaedi, 1966, *Pengantar Hukum Internasional II*, Edisi I, C.V. Aula, Bandung;
- Dirdjosisworo, Soedjono,1999, *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung;
- Jatmika, Sidik, 2001, *Otonomi Daerah (Perspektif Hubungan Internasional)*, Bigraf Publishing;
- Kartadjoemena, HS., 1997, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, Penerbit Universitas Indonesia;
- Kusumaatmadja, Muchtar, 1992, *Pengantar Hukum Internasional I*, Bina Cipta, Bandung
- Mauna, Boer, 2000, *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global)*, PT Alumni, Bandung;
- Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2001, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Tambunan, Tulus, 1998, *Krisis Ekonomi dan Masa Depan Reformasi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta;
- Sofyar, Yon, 1993, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Internasional*, Universitas Andalas;
- Soekatiyo, RG., 1996, *Anatomi Pariwisata ( Memahami Pariwisata Sebagai "Systemic Linkage")*, PT Gramedia Pustaka Utama;